

## **PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB), DANA ALOKASI UMUM, DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP ALOKASI BELANJA DAERAH DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH (Studi Kasus Tahun 2013-2017)**

Fauzan Arioyuda<sup>1✉</sup>, Nugroho SBM<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Departemen IESP Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

✉Email: ojanjansen@gmail.com

### **Abstract**

*The implementation of local autonomy and fiscal decentralization in Indonesia is an strategic step to increase the local independence in the financial and strengthen the local economy base. Although the local has been given great authority to manage potential sources of local revenue, the fact the level of local independence in the financial sector have not shown significant progress. The local government is still dependent on the central government to support development activities and public services for the community at the local level.*

*This research aims to prove empirically the influence of gross regional domestic product, balance funds, and regionally original income to local government expenditure in regencies and cities at Central Java Province.*

*The data that used in this research are quantitave data with the type of panel data in the form of an annual. Time series data started from the period 2013 to 2017, while its cross section data are 35 regencies and cites in Central Java Province. From the merger of two kinds of data has yielded 170 observations. The analysis method that used is panel data regression with fixed effects model approach.*

*Keywords: Local government expenditure, gross regional domestic product, balance funds, and regionally original income*

### **PENDAHULUAN**

Konstitusi Negara Indonesia sebagaimana tercantum pada UUD 1945 mengamanatkan bahwa tujuan dibentuknya negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam memajukan kesejahteraan umum atau masyarakat yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 maka pemerintahan Indonesia menerapkan suatu sistem pemerintah. Sistem pemerintah yang diterapkan adalah sistem pemerintahan sentralistik.

Sistem desentralisasi atau dikenal dengan otonomi daerah yang menjadi tuntutan reformasi mulai diterapkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Alokasi umum Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam perjalanan waktu, kedua UU tersebut kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Alokasi umum Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Penerapan otonomi daerah tersebut, tidak lantas membuat daerah sesukanya menggunakan sumber-sumber daya ekonomi yang daerah miliki. Guna menjamin bahwa konsep otonomi mampu mencapai tujuan yang dikehendaki maka ada

tuntutan agar penyelenggaraan pemerintahan termasuk pemerintah daerah menganut konsep modern dengan istilah *Good Governance*. Jika mengacu pada world bank, *Good Governance* diartikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Prasetyanto, 2016)

Tujuan pemerintah dalam menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta untuk meningkatkan pendapatan daerah. Namun pelaksanaan desentralisasi fiskal tersebut memunculkan fenomena dimana terjadi banyak masalah dalam penerapannya, yaitu pencapaian dari kedua tujuan itu tidak bisa selalu berjalan beriringan. Pengalihan otoritas pengelolaan keuangan daerah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah ternyata tidak dapat diterapkan di semua wilayah. Kebijakan ini memunculkan kesiapan yang berbeda dari setiap daerah. Tumbuhnya perhatian terhadap desentralisasi tidak hanya dikaitkan dengan gagalnya perencanaan pusat dan populernya strategi pertumbuhan dengan pemerataan, tetapi juga adanya kesadaran bahwa pembangunan adalah suatu proses yang kompleks dan penuh ketidakpastian yang tidak dapat dengan penuh dikendalikan dan direncanakan dari pusat.

Salah satu faktor yang mempengaruhi belanja daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah yang merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Dengan ditambahnya infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan merangsang meningkatnya pendapatan penduduk di daerah yang bersangkutan, seiring dengan meningkatnya pendapatan asli daerah. Wagner (1863) Semakin besar dana Pendapatan Asli Daerah berarti semakin besar belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah untuk pembangunan di daerahnya masing-masing.

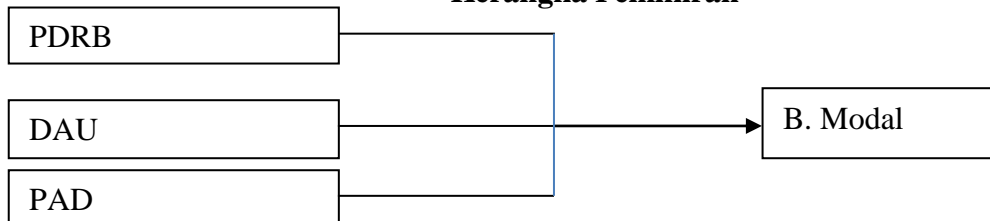
Faktor kedua yang mempengaruhi belanja daerah yaitu Dana Alokasi Umum yang merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya didalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan alokasi umum keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan didalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting. Semakin besar dana alokasi umum ke pemerintah daerah berarti semakin besar belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah.

Faktor ketiga yang mempengaruhi belanja daerah yaitu Produk Domestik Regional Bruto yaitu semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Secara tradisional, pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk peningkatan yang berkelanjutan Produk Domestik Regional Bruto / PDRB (Mudrajad Kuncoro, 2004). Pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, hal inilah yang mendorong daerah untuk

mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi lokal untuk kepentingan pelayanan publik (Mardiasmo, 2002).

## KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

**Gambar 1**  
**Kerangka Pemikiran**



### Hipotesis

Hipotesis adalah suatu pernyataan yang bersifat sementara, tentang adanya suatu hubungan tertentu antara variabel-variabel yang digunakan. Hipotesis dapat diubah atau diganti dengan hipotesis lain yang lebih tepat. Hal ini dimungkinkan karena hipotesis yang diperoleh tergantung pada masalah yang diteliti dan konsep yang digunakan. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari pertanyaan penelitian yang harus dibuktikan kebenarannya, berdasarkan pada landasan teori dan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Hipotesis untuk penelitian bersifat hipotesis satu arah yang dapat diajukan sebagai berikut:

- Ha1 : terdapat pengaruh positif yang signifikan dari Produk Domestik Regional Bruto terhadap Belanja Daerah
- Ha2 : terdapat pengaruh positif yang signifikan dari Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah
- Ha3 : terdapat pengaruh positif yang signifikan dari Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah
- Ha4 : terdapat pengaruh secara simultan dari Produk Domestik Regional Bruto, Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

### TINJAUAN PUSTAKA

#### Model Pembangunan Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Musgrave (1969) menjelaskan bahwa model Rostow-Musgrave menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yaitu tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar karena pada tahap ini pemerintah harus menyediakan kebutuhan masyarakat seperti sarana pendidikan, kesehatan, dan prasarana transportasi. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin besar. Pada tahap menengah peranan pemerintah tetap besar, oleh karena peranan swasta semakin besar akan menimbulkan banyak kegagalan pasar dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak. Dalam suatu proses pembangunan, investasi swasta dalam persentase terhadap PDB semakin besar dan persentase investasi pemerintah terhadap PDB akan semakin kecil. Pada

tingkat ekonomi lebih lanjut, aktivitas pemerintah dalam pembangunan ekonomi beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua dan pelayanan kesehatan masyarakat.

### **Hukum Wagner**

Wagner (1863) menjelaskan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap PDB. Dalam suatu perekonomian apabila pendapatan perkapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah juga akan meningkat. Hukum Wagner dikenal dengan *The Law of Expanding State Expenditure*. Dasar dari hukum tersebut adalah pengamatan empiris dari negara-negara maju. Peranan pemerintah menjadi semakin besar, terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat. Wagner mendasarkan pandangannya dengan suatu teori yang disebut teori organis mengenai pemerintah yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya.

### **Teori Peacock-Wiseman**

Menurut Peacock dan Wiseman,(1961) kebijakan pemerintah untuk menaikkan pengeluaran negara tidak disukai oleh masyarakat, karena hal itu berarti masyarakat harus membayar pajak lebih besar. Masyarakat mempunyai sikap toleran untuk membayar pajak sampai pada suatu tingkat tertentu. Apabila pemerintah menetapkan jumlah pajak di atas batas toleransi masyarakat, ada kecenderungan masyarakat untuk menghindar dari kewajiban membayar pajak. Sikap ini mengakibatkan pemerintah tidak bisa semena-mena menaikkan pajak yang harus dibayar masyarakat.

Dalam kondisi normal, dengan berkembangnya perekonomian suatu negara akan semakin berkembang pula penerimaan negara tersebut, walaupun pemerintah tidak menaikkan tarif pajak. Peningkatan penerimaan negara akan memicu peningkatan pengeluaran dari negara tersebut. Dalam kondisi tidak normal, misalnya dalam keadaan perang, pemerintah memerlukan pengeluaran negara yang lebih besar. Keadaan ini membuat pemerintah cenderung meningkatkan pungutan pajak kepada masyarakat. Peningkatan pungutan pajak dapat mengakibatkan investasi swasta berkurang, sehingga perkembangan perekonomian menjadi terkendala (Mangkoesoebroto, 1999)

### **Belanja Daerah**

Belanja Daerah dikelompokkan menjadi dalam dua jenis yaitu Belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan social, belanja bagi hasil kepada propinsi/kabupaten dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada propinsi/kabupaten dan pemerintah desa, belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal (Badan Pusat Statistik, 2010).

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu rencana untuk mencapai tujuan organisasi pada suatu periode yang dinyatakan dalam satuan moneter. APBD merupakan suatu alokasi penerimaan dan pengeluaran sebagai perencanaan pembangunan dengan mengkoordinasikan semua aktivitas dari berbagai

unit kerja. Anggaran Daerah mempunyai peran penting yaitu sebagai pedoman dan panduan dalam pembangunan Pemerintah Daerah yang mencerminkan kebutuhan masyarakat daerah. APBD merupakan anggaran sector publik yang harus diinformasikan untuk mendapatkan masukan dan kritikan dari anggota DPRD yang merupakan wakil dari masyarakat (Ghozali dan Ratmono 2008).

Tujuan utama dari proses perumusan anggaran adalah menerjemahkan perencanaan ekonomi pemerintah yang terdiri dari perencanaan input dan output dalam satuan keuangan. Oleh karena itu perumusan anggaran harus dapat menggali dan mengendalikan sumber-sumber dana publik. Proses pembuatan satu tahun anggaran tersebut dikenal dengan nama penganggaran. Penganggaran sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik, maka penganggaran merupakan suatu proses politik (Mardiasmo, 2002) Struktur keuangan daerah Kabupaten/Kota terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi umum, Pinjaman Daerah, dan lain lain Penerimaan Daerah yang Sah. Tingkat kemandirian keuangan daerah dapat digambarkan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber keuangan daerah utama dan dapat digali secara terus menerus oleh Pemda. Dengan demikian peran PAD diharapkan dapat meningkat sehingga peran pinjaman daerah dapat dikurangi atau diturunkan dari sumber penerimaan daerah

## **PDRB**

Semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut, merupakan produk domestik daerah yang bersangkutan. Penghitungan produk domestik ini lebih dikenal dengan istilah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan salah satu indikator makro yang dapat menggambarkan kondisi ekonomi di suatu wilayah pada satuan waktu tertentu (Kuncoro, 2004). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di dalam suatu wilayah atau daerah pada suatu periode tertentu, biasanya satu tahun (Kuncoro, 2004). Secara konsep, estimasi penghitungan nilai PDRB menggunakan pendekatan atas dasar harga berlaku (*at current price*), dan atas dasar harga konstan (*at constan price*). Baik PDRB harga berlaku maupun harga konstan masing-masing mempunyai interpretasi data yang berbeda (Kuncoro, 2004). PDRB atas dasar harga berlaku adalah penghitungan PDRB berdasarkan harga tahun berjalan atau harga yang berlaku pada setiap tahun penghitungan dengan masih adanya faktor inflasi di dalamnya. PDRB atas dasar harga konstan adalah penghitungan PDRB berdasarkan harga tetap atau konstan pada tahun tertentu dengan mengabaikan faktor inflasi. PDRB atas dasar harga konstan bertujuan untuk melihat perkembangan PDRB atau perekonomian secara riil yang kenaikannya/pertumbuhannya tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan harga atau inflasi/deflasi (Kuncoro, 2004)

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis dan Sumber Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa Laporan Realisasi APBD Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2017, terdiri dari data realisasi Dana Alokasi umum, PAD, dan

Belanja Daerah yang diperoleh dari Situs Direktorat Jenderal Alokasi umum Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sedangkan data PDRB atas dasar harga konstan 2000 untuk kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2017 diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.

### Populasi dan Sampel

Suatu populasi adalah himpunan unit seperti orang, obyek, transaksi, atau kejadian yang menarik untuk dipelajari (Kuncoro, 2004). Penelitian ini merupakan penelitian populasi, obyek pengamatan dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah yang berjumlah 35 kabupaten/kota tahun 2013-2017.

### Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik inferensi atau induktif. Menurut Kuncoro (2004) statistik inferensi merupakan penggunaan data sampel maupun populasi untuk membuat estimasi, keputusan, atau prediksi. Analisis inferensial dalam penelitian ini yaitu estimasi model regresi dengan penggunaan data panel. Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan model ekonometrika. Menurut Gujarati dan Porter (2013), ekonometrika merupakan campuran dari teori ekonomi, ekonomi matematis, statistika ekonomi, dan statistika matematis. Teori ekonomi membuat hipotesis yang mayoritas bersifat kualitatif, dimana teori tersebut tidak memberikan suatu ukuran dalam angka mengenai hubungan antar 2 atau lebih variabel. Hal tersebut menjadi tugas ekonometrika untuk memberikan dugaan dalam bentuk angka secara empiris.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengujian untuk Memilih Pendekatan Terbaik

Terdapat 3 macam pendekatan dalam analisis data panel, yaitu PLS, FEM, dan REM. Model yang terbaik sebagai pendekatan dalam analisis didasarkan pada 2 langkah pengujian, yaitu *redundant test* dan uji Hausman.

*Redundant test* bertujuan untuk memilih apakah model yang digunakan PLS atau FEM. Dalam pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

$H_0$ : *Pooled Least Square (Restricted)*

$H_1$ : *Fixed Effects Model (Unrestricted)*

Hasil *redundant test* ditampilkan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1. Redundand Test**

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.797798	(34,137)	0.0000
Cross-section Chi-square	116.197491	34	0.0000

Sumber: Olahan data, 2018

*Prob. chi square* pada uji tersebut sebesar 0,0000 dan kurang dari alfa 0,05 atau *prob. chi square* <  $\alpha$ . Maka cukup bukti untuk penolakan terhadap  $H_0$ , artinya model terbaik yang digunakan adalah FEM.

Uji Hausman digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memilih antara menggunakan FEM atau REM. Pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

$H_0$  : *Random Effects Model*

$H_1$  : *Fixed Effects Model*

Hasil uji Hausman ditampilkan dalam tabel berikut:

**Tabel 2. Uji Hausman**

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	57.335958	3	0.0000

Sumber: Olahan data, 2018

*Prob. chi square* pada uji tersebut sebesar 0,0000 dan kurang dari alfa 0,05 atau  $prob. chi square < \alpha$ . Maka cukup bukti untuk penolakan terhadap  $H_0$ , artinya model terbaik yang digunakan adalah Fixed Effect Model.

### Deteksi Asumsi Klasik

Ariefianto (2012) menjelaskan bahwa penggunaan *Ordinary Least Square* (OLS) mensyaratkan pemenuhan beberapa asumsi klasik. Jika asumsi klasik terpenuhi, maka parameter yang diperoleh dengan OLS adalah bersifat *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE). Uji asumsi klasik dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

### Deteksi Normalitas

Deteksi normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel-variabel dalam model regresi terdistribusi normal atau tidak. Model Regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Hasil deteksi ditampilkan pada gambar berikut:

**Tabel 3. Deteksi Normalitas**

JB statistic	Probabilitas	Keterangan
133,34	0,0000	Tidak Normal

Sumber: Olahan data, 2018

*Prob. value* dalam Tabel 3 diatas sebesar 0,000 dan alfa adalah 0,05. Maka  $prob. value < \alpha$  sehingga dengan tingkat keyakinan 95% dapat dikatakan bahwa residual terdistribusi tidak normal. Asumsi normalitas bisa dikesampingkan ketika jumlah sample yang diambil terbilang besar. Pada penelitian ini, jumlah sample yang digunakan adalah 35 kabupaten/kota selama 5 tahun (2013-2017), sehingga jumlahnya 175 sample.

### Deteksi Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak sama pada semua pengamatan di dalam model regresi. Deteksi heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Untuk membuktikan tidak adanya masalah heteroskedastisitas, dalam penelitian ini digunakan Uji Park. Hasil Uji Park ditampilkan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4. Deteksi Heteroskedastisitas**

Variabel	t-Statistik	Probabilitas
----------	-------------	--------------

Konstanta	-0.545426	0.5863
LnPAD	-0.601633	0.5484
LnDAU	0.311529	0.7559
LnPDRB	0.377968	0.7060

Sumber: Olahan data, 2018

Dari Tabel 4 diketahui *prob. value* dari seluruh variabel bebas kurang dari alfa 0,05 atau dengan kata lain variabel bebas mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap residual kuadrat pada alfa 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa varian residual bersifat homoskedastik.

### Deteksi Multikolinearitas

Deteksi multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Hasil deteksi ditampilkan dalam tabel korelasi bivariat berikut:

**Tabel 5. Deteksi Multikolinearitas**

	LN(PAD)	LN(DAU)	LN(PDRB)
LN(PAD)	1	0.527	0.678
LN(DAU)	0.527	1	0.678
LN(PDRB)	0.678	0.678	1

Sumber: Olahan data, 2018

Dapat dilihat dari Tabel 5 diatas bahwa nilai koefisien korelasi antar variabel bebas tidak lebih dari 0,80 dengan demikian tidak terjadi masalah multikolinearitas (Gujarati dan Porter, 2013).

Berdasarkan data yang diperoleh, dilakukan analisis regresi untuk memperoleh model yang menjelaskan belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang dipengaruhi oleh PDRB, DAU, dan PAD dengan formula sebagai berikut:

$$\text{LnBD}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{LnPDRB}_{it} + \beta_2 \text{LnDAU}_{it} + \beta_3 \text{LnPAD}_{it} + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots$$

A = intersep

$\beta_{1,2,3}$  = konstanta masing-masing variabel bebas

$\varepsilon$  = *error term*

$\text{BD}_{it}$  = belanja daerah

$\text{PDRB}_{it}$  = produk domestik regional bruto riil

$\text{DAU}_{it}$  = dana alokasi umum

$\text{PAD}_{it}$  = pendapatan asli daerah

Ln = Logaritma Natural

I = data *cross section*, yaitu 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah

T = tahun penelitian, yaitu tahun 2013-2017

**Tabel 6. Hasil Regresi**

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistik	Probabilitas
Konstanta	-13.71373	2.592415	-5.289943	0.0000
LN(PAD)	0.111985	0.047933	2.336294	0.0209
LN(DAU)	0.705133	0.208820	3.376754	0.0010
LN(PDRB)	1.017373	0.254278	4.001021	0.0001



<i>Adjusted R<sup>2</sup></i>	0.9678
F-Statistik	111,55
Prob(F-Statistik)	0,0000
DW stat	1,9674

---

Dari hasil tersebut, dapat ditulis persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{LnBD} = -13.71373 + 1.017373\text{LnPDRB} + 0.705133\text{LnDAU} + 0.111985\text{LnPAD} + e$$

.....

Berdasarkan analisis regresi diketahui variabel PDRB memiliki nilai t-statistik  $4.001021 > t\text{-tabel } 1,96$  dengan signifikansi  $0,0001 < \text{alfa } 0,05$ . Maka koefisien regresi tersebut signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Koefisien regresi sebesar 1.017373 artinya jika terjadi kenaikan pada variabel PDRB sebesar 1 persen, maka belanja daerah akan naik sebesar 1.017373 persen dengan asumsi variabel DAU dan PAD dalam kondisi konstan.

Berdasarkan analisis regresi diketahui variabel dana alokasi umum memiliki nilai t-statistik  $3.376754 > t\text{-tabel } 1,96$  dengan signifikansi  $0,001 < \text{alfa } 0,05$ . Maka koefisien regresi tersebut signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Koefisien regresi sebesar 0.705133 artinya jika terjadi kenaikan pada variabel dana alokasi umum sebesar 1%, maka belanja daerah akan naik sebesar 0.705133% dengan asumsi variabel PDRB dan PAD dalam kondisi konstan.

Berdasarkan analisis regresi diketahui variabel PAD memiliki nilai t-statistik  $2.336 > t\text{-tabel } 1,96$  dengan signifikansi  $0,0209 < \text{alfa } 0,05$ . Maka koefisien regresi tersebut signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Koefisien regresi sebesar 0.111985 artinya jika terjadi kenaikan pada variabel PAD sebesar 1%, maka belanja daerah akan naik sebesar 0.111985% dengan asumsi variabel PDRB dan dana alokasi umum dalam kondisi konstan.

Tabel 6 menunjukkan bahwa diperoleh F-hitung sebesar 111,55 dengan probabilitas F-statistik sebesar 0,0000. Jika dilihat dari nilai signifikansi F tersebut, diperoleh bahwa nilai F-tabel dengan  $df_1 = 4-1 = 3$  dan  $df_2 = 175-4 = 171$  adalah sebesar 2,60. Dengan F-hitung ( $111,55 > F\text{-tabel } (2,60)$ ) dan karena signifikansi lebih kecil dari alfa 0,05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa PDRB, dana alokasi umum, dan PAD secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.
2. Dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.
3. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.
4. Hasil penelitian menyatakan bahwa PDRB, dana alokasi umum, PAD secara bersama-sama atau simultan berpengaruh positif terhadap belanja daerah sesuai dengan teori pengeluaran pemerintah secara makro.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ariefianto, M.D. 2012. *Ekonometrika: Esensi dan Aplikasi dengan Menggunakan Eviews*. Jakarta: Erlangga.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2010, *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2009-2010*, Semarang
- Ghozali, I. dan D. Ratmono. 2013. *Analisis Multivariat dan Ekonometrika: Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan Eviews 8*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N. dan D. C. Porter. 2013. *Dasar-Dasar Ekonometrika Buku 1*. 5 ed. Jakarta: Salemba Empat.
- Kuncoro, M. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- \_\_\_\_\_ 2004. *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi*. 2 ed. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.
- Mangkoesebroto, G. 1999. *Ekonomi Publik*. 3 ed. Yogyakarta: BPFE UGM
- Mardiasmo, 2002, “*Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*”. Penerbit ANDI, Yogyakarta
- Musgrave, R.A., (1969), *Fiscal systems*. New Haven and London: Yale University Press
- Peacock, A.T., dan J. Wiseman, (1961), *The Growth of Public Expenditure in the United Kingdom*. Princeton, N.J: Prince University Press
- Prasetyanto, Sindu Karno, 2016, *Pengaruh Alokasi Belanja Modal, Kemiskinan, Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Serta Evaluasi Kinerja Pemerintahan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah*, Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Wagner, Adolph, (1863), “*Grundlegung der Politischen Okonomie*”. Charleston: Nabu Press